



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui kualitas kebijakan daerah, dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pedoman penilaian Indeks Kualitas Kebijakan digunakan sebagai acuan untuk penilaian kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Bersama Bupati.
4. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
5. Perangkat Daerah Inisiator Kebijakan adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan sesuai dengan urusannya, selaku inisiator kebijakan yang bertugas untuk melengkapi bukti-bukti pendukung penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kebijakan.
6. Dewan Pertimbangan (*Board Member*) Indeks Kualitas Kebijakan adalah pihak yang bertugas untuk melakukan validasi, verifikasi, hingga memberikan penilaian terhadap Indeks Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah.
7. Indeks Kualitas Kebijakan adalah instrumen untuk menilai kualitas kebijakan pemerintah dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan pengelolaan agenda, formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan.

8. Perencanaan Kebijakan adalah proses perumusan dan identifikasi permasalahan hingga pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.
9. Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan adalah proses implementasi, monitoring, dan evaluasi terhadap dampak kebijakan.
10. Agenda Setting adalah proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.
11. Formulasi Kebijakan adalah proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur.
12. Implementasi Kebijakan adalah dimensi pengorganisasian, komunikasi kebijakan, dan monitoring kebijakan.
13. Evaluasi Kebijakan adalah proses implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap respon, penerimaan publik, dampak serta kemanfaatan kebijakan.

BAB II

PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

Pasal 2

- (1) Setiap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dilakukan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.
- (2) Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses perencanaan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan publik di Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Kebijakan yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun penilaian.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
 - a. kebijakan yang bersifat rutin ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu; dan/ atau
 - b. kebijakan yang sifatnya mengatur kedalam/internal Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dilaksanakan pada triwulan keempat tahun berjalan.

Pasal 5

Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi dimensi:

- a. Perencanaan kebijakan, terdiri atas komponen Agenda Setting Kebijakan dan Formulasi Kebijakan; dan
- b. Evaluasi kemanfaatan kebijakan, terdiri atas komponen Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

Pasal 6

- (1) Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan, dilaksanakan secara berjenjang dari penilaian mandiri perangkat daerah sampai dengan penilaian ditingkat Kabupaten.
- (2) Perangkat daerah dalam melakukan penilaian mandiri membentuk Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan, yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah, dengan susunan minimal sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Sekretaris : Sekretaris Perangkat Daerah;
 - c. Anggota : Kepala Bidang yang membidangi.
- (3) Penilaian di tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan (*Board Member*) yang ditetapkan oleh Bupati, dengan susunan minimal sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - c. Koordinator Bidang : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - d. Koordinator Bidang : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - e. Koordinator Bidang : Asisten Administrasi Umum
 - f. Anggota : Kepala Bagian yang membidangi dan Analisis Kebijakan yang membidangi
- (4) Dalam melaksanakan tugas penilaian, Dewan Pertimbangan dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.

Pasal 7

Pedoman penilaian Indeks Kualitas Kebijakan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Penilaian yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan mulai bulan Oktober tahun 2020.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 33

NOREG PERBUP : 33 Tahun 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era disrupsi mendorong kesadaran publik terhadap kinerja pemerintah yang lebih baik. Perhatian akan kualitas kebijakan menjadi bagian yang perlu terus diperbaiki secara berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi salah satu motto yang selalu digaungkan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya kepada publik.

Pada Tahun 2020 telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimana salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional ialah melalui Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan. Oleh karena itu, dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah perlu secara aktif bergerak untuk dapat meningkatkan kualitas kebijakan di instansinya melalui berbagai inisiatif. Salah satu inisiatif yang perlu menjadi agenda kedepan adalah pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada seluruh sector instansi pemerintah.

Permasalahan terkait dengan kebijakan pemerintah adalah kualitas kebijakan masih buruk, tumpang tindih, tidak berpihak pada publik, serta minim *evidence based* (belum didahului oleh kajian dan lain-lain). Tahun 2005-2015 terdapat 41.223 regulasi di pusat dan daerah yang berpotensi tumpang tindih (Bappenas, 2015), sehingga beberapa kebijakan yang tumpang tindih tersebut dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, namun pembatalan tersebut belum mampu menyelesaikan permasalahan. Oleh sebab itu diperlukannya perbaikan manajemen kebijakan terutama dalam proses

perumusan kebijakan dari hulu hingga hilir. Oleh sebab itu Lembaga Administrasi Negara merumuskan Indeks Kualitas Kebijakan.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berupaya mendorong kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk berpartisipasi menilai kebijakan instansinya menggunakan Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan Surat Edaran LAN Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Penilaian Kualitas Kebijakan. Melalui Surat Edaran tersebut, kemudian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penilaian mandiri atas Indeks Kualitas Kebijakan di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat menilai kualitas kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, serta melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pedoman Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini digunakan acuan untuk penilaian kebijakan di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo sampai dengan level peraturan teknis, yaitu Peraturan Bupati, Instruksi, Surat Keputusan, dan lain-lain yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dasar (misal: Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain). Hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut menghasilkan profil kualitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan strategi peningkatan kualitas kebijakan secara berkelanjutan.

1.2 Tujuan Indeks Kualitas Kebijakan

Tujuan Indeks Kualitas Kebijakan adalah untuk mendorong penguatan partisipasi dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam proses pembuatan kebijakan publik di Instansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.3 Manfaat Indeks Kualitas Kebijakan

- 1.3.1 Instrumentasi menilai kualitas kebijakan secara mudah dan cepat.
- 1.3.2 Mengungkapkan profil kualitas kebijakan publik nasional.
- 1.3.3 Media apresiasi dan advokasi kepada instansi pemerintah sebagai pembelajaran baik dalam tata Kelola kebijakan.
- 1.3.4 Peningkatan kualitas pembinaan analisis kebijakan.
- 1.3.5 Tersedianya sarana sharing pembelajaran (best practice) antar instansi pemerintah.

BAB II

TATA CARA PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

2.1 Ruang Lingkup Penggunaan Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan

Ruang lingkup jenis kebijakan yang diajukan sebagai sasaran Penilaian kualitas kebijakan dengan instrument Indeks Kualitas Kebijakan diambil menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 2.1.1 Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan pada triwulan keempat tahun berjalan (tahun n).
- 2.1.2 Kebijakan yang menjadi obyek Penilaian kualitas kebijakan merupakan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebelum tahun penilaian



PERATURAN DAERAH



**PERATURAN KEPALA
DAERAH**

- 2.1.3 Kebijakan yang dikecualikan sebagai obyek Penilaian kualitas kebijakan yang dilaporkan untuk eksternal yaitu:

- a. Kebijakan yang sifatnya rutin ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu.

Misalnya:

- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

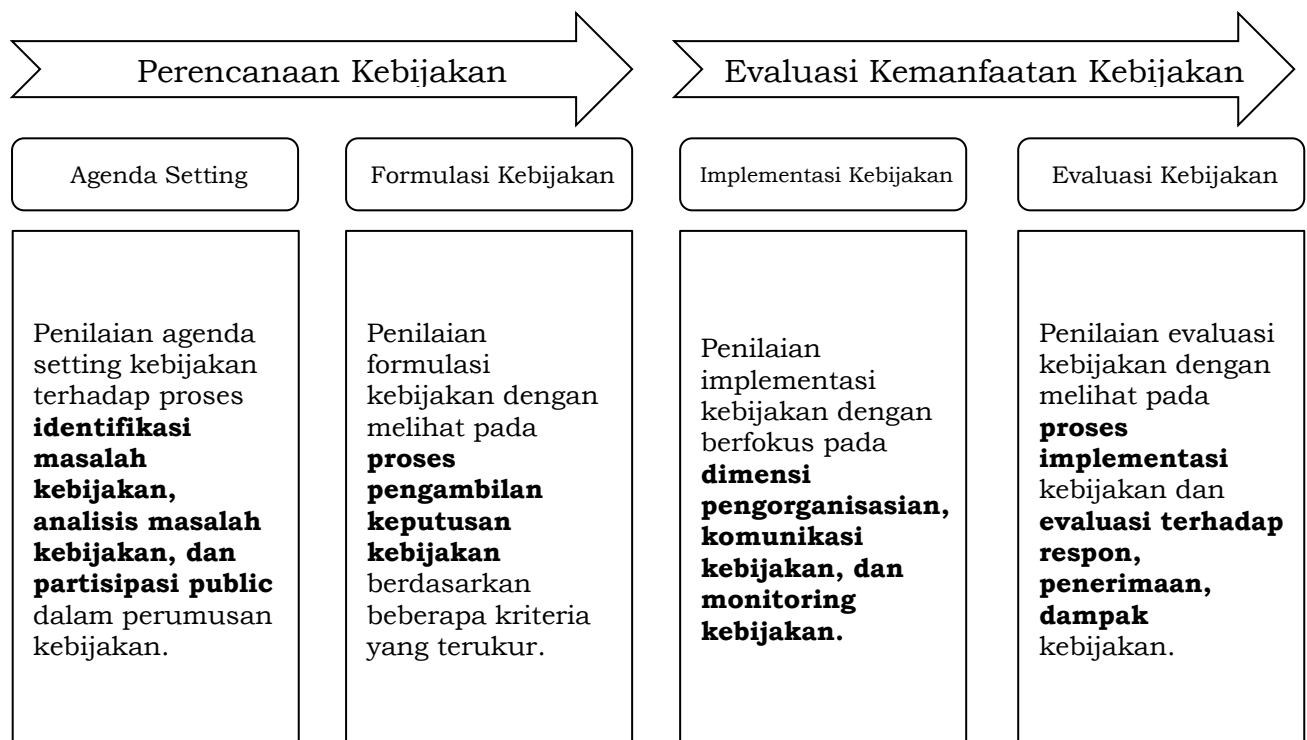
- b. Kebijakan yang sifatnya mengatur kedalam/internal Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Misalnya:

- Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perangkat Daerah

- Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi.
- Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo tentang indicator kinerja utama daerah
- Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo tentang Standar Operasional dan Prosedur Instansi.

2.1. Kerangka Indeks Kualitas Kebijakan



Tabel 2. 1 Kerangka Indeks Kualitas Kebijakan

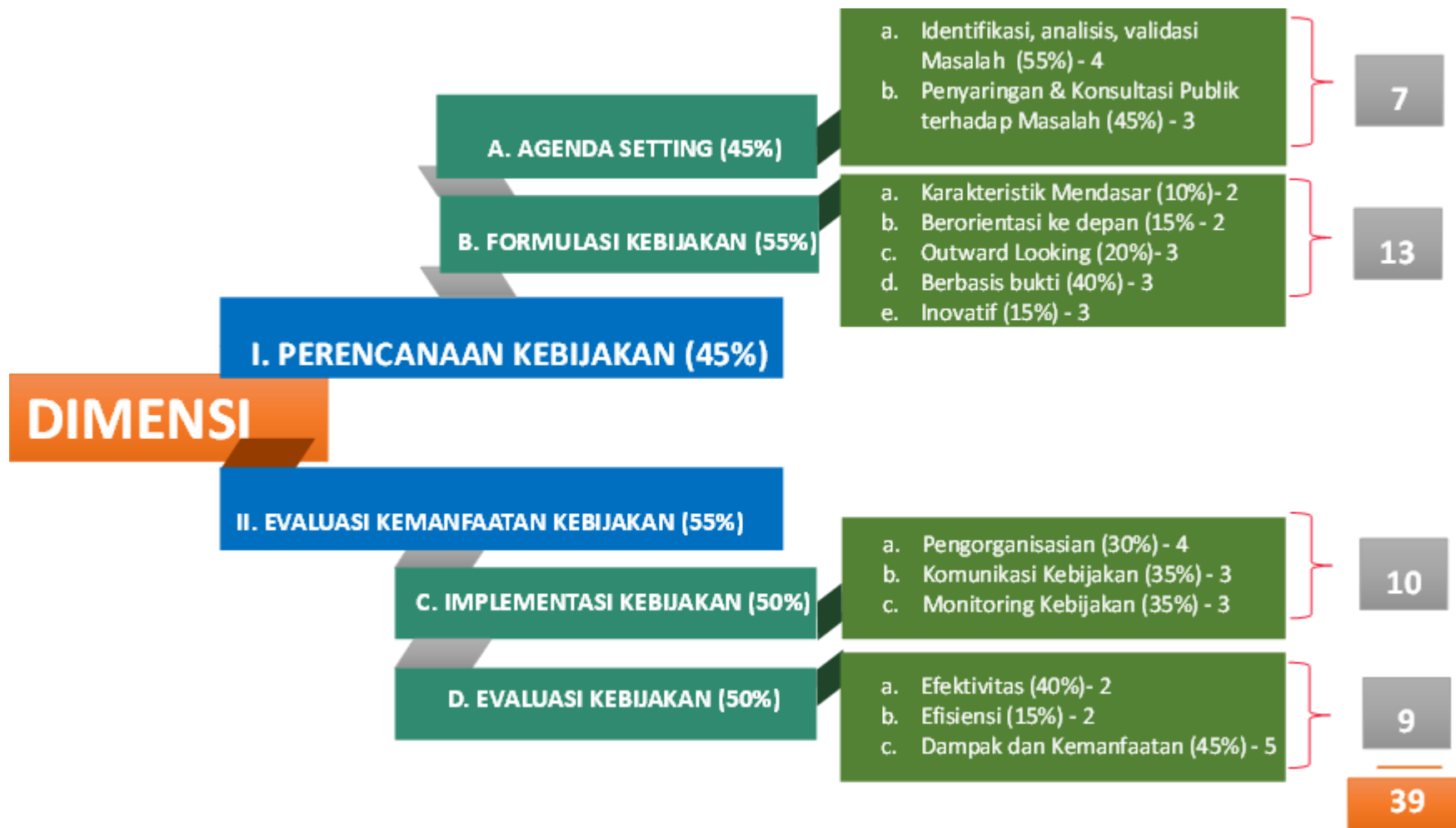
Sumber: Toolkit Indeks Kualitas Kebijakan, 2021

2.2.1. Perencanaan Kebijakan

- Penilaian Agenda Setting Kebijakan terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan; dan
- Penilaian Formulasi Kebijakan dengan melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur.

2.2.2 Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan

- Penilaian Implementasi Kebijakan dengan berfokus pada dimensi perencanaan, kelembagaan, dan komunikasi kebijakan; dan
- Penilaian Evaluasi Kebijakan dengan melihat pada proses implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap respon, penerimaan publik, dampak, serta kemanfaatan kebijakan.



Gambar 2. 1 Dimensi Indeks Kualitas Kebijakan

Sumber : Lembaga Administrasi Negara, 2021

2.2. TAHAPAN PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

2.3.1 Penilaian Mandiri oleh Perangkat Daerah Inisiator Kebijakan Kabupaten Sidoarjo (*Self Assessment*)

Dilakukan dengan cara Penilaian mandiri yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah Inisiator Kebijakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang memiliki Kebijakan berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan.

Pada tahap Penilaian Mandiri, Tim Penilaian Internal Perangkat Daerah melakukan tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan bukti pendukung kebijakan untuk penilaian Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan komponen dimensi IKK.
- b. Melakukan penilaian mandiri dan memberikan bukti dukung kebijakan yang dibuat dengan mengacu pada Lembaer Kerja Evaluasi.
- c. Mengupload hasil penilaian mandiri dan bukti dukung kebijakan pada system yang tersedia.
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan kebijakan dari Dewan Pertimbangan (*Board Member*) apabila diperlukan.

2.3.2 Pada tahap penilaian di tingkat Kabupaten, Dewan Pertimbangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Penentuan kebijakan daerah yang akan dinilai sesuai dengan kriteria kebijakan yang menjadi obyek penilaian kualitas kebijakan yang telah ditentukan.
- b. Menginformasikan kepada Perangkat Daerah kebijakan yang akan dinilai.
- c. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian isian melalui validasi jawaban dan bukti dukung yang digunakan dalam melengkapi isian formulir *Self Assessment* IKK, serta pemenuhan bukti dukung yang belum tercukupi.
- d. Melakukan validasi data atas bukti dukung bersama Perangkat Daerah.

- e. Melakukan penilaian akhir dan pemeringkatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil penilaian.
- f. Pemaparan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan oleh Dewan Pertimbangan (*Board Member*) Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Sidoarjo.
- g. Merekomendasikan perbaikan kebijakan selanjutnya untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah apabila diperlukan.

Tabel 2. 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Tahapan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan

No	Kegiatan	Pelaksana			Output	Keterangan
		Perangkat Daerah Inisiator Kebijakan	Dewan Pertimbangan	Waktu		
1.	Mulai					
2.	Penentuan kebijakan daerah yang akan dinilai sesuai dengan kriteria kebijakan yang menjadi obyek penilaian kualitas kebijakan yang telah ditentukan			2 Hari Kerja	List Kebijakan (Perda dan Perkada sesuai dengan kualifikasi) yang akan dinilai	Minggu pertama Oktober
3.	Menginformasikan kepada Perangkat Daerah terhadap kebijakan yang akan dinilai			2 Hari Kerja	Surat Pemberitahuan Penilaian	Minggu pertama Oktober
4.	Melakukan pengumpulan bukti pendukung kebijakan untuk penilaian Indeks Kualitas Kebijakan sesuai dengan komponen dimensi IKK			14 Hari Kerja	Bukti dukung kecukupan penilaian kebijakan (<i>Softfile</i> atau <i>hardfile</i>): Dimensi perencanaan kebijakan dan evaluasi kemanfaatan kebijakan.	Minggu kedua dan ketiga Oktober
5.	Melakukan penilaian mandiri dan memberikan bukti dukung kebijakan yang dibuat dengan mengacu pada Lembar Kerja Evaluasi			7 Hari Kerja	Lembar Kerja Evaluasi (LKE) IKK	Minggu keempat Oktober
6.	Mengupload hasil penilaian mandiri dan bukti dukung kebijakan pada <i>system</i> yang tersedia			2 Hari Kerja	Tautan sistem bukti dukung yang tersedia (contoh: tautan / <i>link google drive</i>)	Minggu pertama November
7.	Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian isian melalui validasi jawaban dan bukti dukung yang digunakan dalam melengkapi isian formulir Self Assessment IKK, serta pemenuhan bukti dukung yang belum tercukupi			20 Hari Kerja	Verifikasi jawaban dan bukti yang digunakan dalam melengkapi isian formulir <i>self assessment</i> IKK	Minggu pertama, kedua dan ketiga November
8.	Melakukan validasi data atas bukti dukung bersama Perangkat Daerah			7 Hari Kerja	Validasi jawaban dan bukti yang digunakan dalam melengkapi isian formulir <i>self assessment</i> IKK	Minggu keempat November
9.	Melakukan penilaian akhir dan pemeringkatan Perangkat Daerah berdasarkan hasil penilaian			3 Hari Kerja	Finalisasi penilaian dan menghasilkan indeks serta pemeringkatan instansi sesuai hasil penilaian akhir IKK	Minggu pertama Desember
10.	Pemaparan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan oleh Dewan Pertimbangan (<i>Board Member</i>) Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Sidoarjo			2 Hari Kerja	Pemaparan Hasil Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan oleh Dewan Pertimbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo	Minggu pertama Desember
11.	Merekomendasikan perbaikan kebijakan selanjutnya untuk ditindaklanjuti Perangkat Daerah apabila diperlukan			3 Hari Kerja	Surat rekomendasi perbaikan kebijakan	Minggu Kedua Desember
12.	Selesai					

Tabel 2. 3 Lembar Kerja Evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan

PERENCANAAN KEBIJAKAN								45			Nilai Riil	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence
A.	AGENDA SETTING							45			20,25		
	A.1	Identifikasi, validasi masalah							55				
		Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikator	Ni*BI	2,784375	List bukti dukung Enumerator (Perangkat Daerah)
a.	Sumber masalah kebijakan yang mendorong inisiatif tindak lanjut perumusan kebijakan	a	Penentuan masalah berasal dari atas (top down) maupun dari bawah (bottom up), dengan melibatkan stakeholder eksternal dan partisipasi kelompok sasaran	Dokumen yang menunjukkan proses interaksi instansi dengan stakeholder dan/atau kelompok sasaran sebelum diterbitkannya kebijakan yang membahas sumber masalah kebijakan misalnya surat undangan rapat/pertemuan/FGD atau naskah analisis kebijakan atau naskah rekomendasi kebijakan terkait masalah kebijakan (yang sedang dinilai).	kelompok sasaran adalah pihak-pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan atau terdampak dari pelaksanaan kebijakan	A/B/C/D	A	100%	2,78438	2,784375			Menyajikan link google drive yang dapat diakses berisikan Bukti Dukung
		b	Penentuan masalah dari atas (top down) maupun dari bawah (bottom up) dengan mempertimbangkan masukan stakeholder eksternal										
		c	Penentuan masalah dari atas (top down). melibatkan stakeholder eksternal pemerintah. tanpa partisipasi kelompok sasaran										
		d	Penentuan masalah dari atas (top down). hanya ditentukan dari internal instansi pemerintah, tanpa partisipasi stakeholder eksternal dan kelompok sasaran										
b.	Masalah kebijakan yang diidentifikasi merupakan isu kebijakan yang menjadi bagian dari program prioritas nasional.	a	Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek dan jangka menengah	Dokumen yang menunjukkan keterkaitan kebijakan dengan program prioritas nasional di periode tahun terbitnya kebijakan, misalnya tercantum dalam Perpres tentang Program Prioritas Nasional atau prolegnas atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari ketetapan kebijakan (yang sedang dinilai) atau tercantum dalam RPJMN/RPJMD dan disertai penjelasan.	pilih salah satu jawaban	A/B/C/D	A	100%	2,78438	2,784375			
		b	Berkaitan secara langsung dengan prioritas nasional jangka pendek atau jangka menengah										
		c	Berkaitan secara tidak langsung dengan prioritas nasional jangka pendek atau jangka menengah										
		d	Tidak berkaitan dengan prioritas nasional dalam jangka pendek atau jangka menengah										

	c.	Masalah kebijakan yang diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan masyarakat umum dan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan di masyarakat atau di ranah publik sesuai sektor kebijakannya.	a	Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum dan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan	Naskah analisis kebijakan atau rekomendasi kebijakan atau berita media massa atau berupa hasil tertulis dari pertemuan/diskusi/rapat/FGD yang melibatkan kelompok yang memiliki kebutuhan spesifik/khusus sebelum terbitnya kebijakan (yang sedang dinilai) atau pernyataan dari Instansi atau lembaga terkait, seperti Komnas Anak/Perempuan, Organisasi disabilitas, serikat buruh, kelompok atau stakeholder lain yang menunjukkan perlunya diterbitkan kebijakan (yang sedang dinilai) sebagai alternatif solusi dari masalah kebijakan yang dihadapi oleh kelompok rentan di masyarakat, dan penjelasannya	kelompok rentan adalah kelompok tertentu dalam skala minoritas yang mungkin kurang mendapatkan manfaat yang optimal dari pelaksanaan kebijakan (misalnya kelompok perempuan, disabilitas, lansia, masyarakat adat, kelompok usaha mikro, fakir miskin, penyintas penyakit tertentu)	A/B/C/D	A	100%	2,78438	2,784375				
	b	Masalah kebijakan berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan													
	c	Masalah berkaitan secara tidak langsung dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan													
	d	Masalah tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum atau kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kerentanan													
	d.	Situasi perhatian stakeholder/publik terhadap masalah kebijakan.	a	Perhatian stakeholder/publik sangat intensif terhadap masalah, menimbulkan konflik, dan mendesak instansi mengambil kebijakan	Naskah analisis kebijakan, hasil kajian/telaahan, rekomendasi kebijakan, berita media massa, surat pembaca, surat keluhan/protes tertulis, quick survey isu, dokumentasi tertulis hasil pertemuan/diskusi/rapat/FGD yang mendesak terbitnya kebijakan (yang sedang dinilai) untuk mengatasi masalah.	intensitas dapat dilihat dari situasi perhatian publik/stakeholder baik di media massa, media sosial, atau media interaksi lainnya dalam lingkup kebijakannya.	A/B/C/D	A	100%	2,78438	2,784375				
	b	Perhatian stakeholder/publik cukup intensif terhadap masalah, menimbulkan polemik tanpa konflik, dan mendorong instansi mengambil kebijakan													
	c	Perhatian stakeholder/publik kurang intensif terhadap masalah, polemik rendah, dan mengharapkan instansi mengambil kebijakan													
	d	Perhatian stakeholder/publik tidak ada terhadap masalah, tidak ada polemik, dan tidak urgen bagi instansi untuk mengambil kebijakan													
		Indeks Aspek 1										11,1375	1,24043906		
	A.2	Penyaringan dan Konsultasi Publik terhadap Masalah Kebijakan								45			9,1125		
		Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikator	Ni*BI	3,0375	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence	
	a.	Proses penyaringan masalah dilakukan secara demokratis dan ilmiah	a	Isu ditentukan dengan konsensus aspirasi seluruh stakeholder dan dilakukan analisis kebijakan terkait	Dokumen yang menunjukkan dokumentasi interaksi instansi dengan stakeholder dan/atau kelompok sasaran yang	Pilih salah satu jawaban	A/B/C/D	A	100%	3,0375	3,0375				

		a.	Kebijakan memiliki tujuan yang jelas	a	Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit dan mudah dipahami	Naskah Kebijakan	terdapat pernyataan tujuan kebijakan: (1) apa saja yang diatur, (2) didefinisikan dengan jelas, (3) siapa saja yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan, (4) tugas, fungsi, hak, kewajiban terdefinisi dengan jelas	A/B/C/D	A	100%	1,2375	1,2375				
				b	Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit namun kurang dapat dipahami											
				c	Tujuan kebijakan dinyatakan secara eksplisit namun tidak dapat dipahami											
				d	Tidak terdapat tujuan kebijakan secara eksplisit											
		b.	Kebijakan didasarkan pada opsi kebijakan yang masing-masing opsi telah dikaji kemanfaatannya	a	Semua Opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya	Background paper/ kajian kebijakan yang melatar belakangi formulasi kebijakan	Terdapat beberapa opsi kebijakan yang dikaji kemanfaatannya	A/B/C/D	A	100%	1,2375	1,2375				
				b	Sebagian opsi kebijakan telah dikaji kemanfaatannya											
				c	hanya satu opsi kebijakan yang dikaji kemanfaatannya											
				d	tidak ada opsi yang dikaji kemanfaatannya											
			Indeks Aspek 3										2,475			
		B.2	Berorientasi Kedepan								15		3,7125			
			Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikator	Ni*BI	1,85625	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence	
		a.	kebijakan yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan	a	Seluruh isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan dengan baik	(1) Naskah Kebijakan; (2) background paper/naskah akademik kebijakan	Terdapat pernyataan terhadap masalah yang akan diselesaikan dan mempertimbangkan proyeksi dinamika permasalahan kedepan dan terkait dengan mitigasi resikonya	A/B/C/D	A	100%	1,85625	1,85625				
				b	Sebagian besar isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan ke depan											
				c	Hanya sebagian kecil isi kebijakan dapat menjawab permasalahan dan tantangan saat ini dan kedepan											
				d	Kebijakan tidak dapat menjawab permasalahan saat ini maupun ke depan											
		b.	muatan/substansi kebijakan telah mempertimbangkan risiko dan penanganan risiko yang mungkin timbul	a	Terdapat strategi penanganan terhadap semua resiko yang telah dipetakan	(1) Naskah Kebijakan; (2) Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan; (3) Peta resiko dan mitigasi resiko	kajian/analisis kebijakan telah melakukan mitigasi risiko dari implementasi kebijakan yang meliputi pemetaan risiko, pemetaan stakeholder, serta penetapan strategi	A/B/C/D	A	100%	1,85625	1,85625				
				b	Terdapat strategi penanganan terhadap sebagian besar resiko yang telah dipetakan											
				c	Terdapat strategi penanganan terhadap beberapa resiko											

		d	Tidak terdapat analisis strategi penanganan resiko		penanganan risiko yang mungkin timbul									
	Indeks Aspek 4										3,7125			
B.3	Outward Looking							20			4,95			
	Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikator	Ni*BI	1,65	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence	
a.	rumusan kebijakan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholder serta mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan	a	rumusan kebijakan memenuhi seluruh kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan seluruh lingkungan eksternal kebijakan	(1) Naskah Kebijakan Background paper/ kajian kebijakan Yang mendasari formulasi kebijakan	perlu dilakukan pemetaan stakeholder untuk dapat menilai cakupan kebutuhan stakeholder dalam ruang lingkup kebijakan yang sedang dinilai.	A/B/C/D	A	100%	1,65	1,65				
		b	rumusan kebijakan memenuhi sebagian besar kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan sebagian besar lingkungan eksternal kebijakan											
		c	rumusan kebijakan memenuhi sebagian kecil kebutuhan stakeholder dan mempertimbangkan sebagian kecil lingkungan eksternal kebijakan											
		d	rumusan kebijakan tidak memenuhi kebutuhan stakeholder dan tidak mempertimbangkan lingkungan eksternal kebijakan											
b.	rancangan kebijakan dikonsultasikan kepada stakeholder dan pihak Yang akan terdampak	a	seluruh materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada seluruh stakeholder dan pihak Yang akan terdampak	Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan	Terdapat analisis stakeholder; terdapat laporan perkonsultasian atau uji publik di fase formulasi kebijakan dan terdapat catatan masukan yang diakomodasikan	A/B/C/D	A	100%	1,65	1,65				
		b	seluruh materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada sebagian besar stakeholder dan pihak Yang akan terdampak											
		c	beberapa bagian materi rancangan kebijakan dilakukan konsultasi kepada beberapa stakeholder dan pihak Yang akan terkena dampak											
		d	rancangan kebijakan tidak dilakukan konsultasi dengan stakeholder dan pihak yang akan terdampak											

		c.	rancangan kebijakan mempertimbangkan kepentingan kelompok rentan Yang berpotensi terdampak, baik langsung ataupun tidak langsung	a	Semua kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan	Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan	Terdapat hasil Identifikasi kelompok rentan, pelibatan dan masukan dari kelompok rentan	A/B/C/D	A	100%	1,65	1,65					
				b	sebagian besar kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan												
				c	sebagian kecil kelompok rentan dipertimbangkan dalam rancangan kebijakan												
				d	tidak mempertimbangkan kelompok rentan dalam rancangan kebijakan												
				Indeks Aspek 5												4,95	
		B.4	Berbasis Bukti									40			9,9		
			Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikator	Ni*BI	3,3	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence		
		a	perumusan kebijakan dilakukan berdasarkan kajian dan analisis yang memadai	a	Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang sangat memadai	Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan	Terdapat Kajian/ research yang khusus dilakukan untuk mendukung perumusan kebijakan ini dan tersusun secara sistematis dan memenuhi aspek-aspek ilmiah yang meliputi:	A/B/C/D	A	100%	3,3	3,3					
							(1) identifikasi masalah dan penetapan tujuan kebijakan										
							(2) pengembangan kriteria pemecahan masalah										
							(3) pengembangan alternatif-alternatif kebijakan										
							(4) evaluasi alternatif kebijakan berdasarkan kriteria										
		d	Perumusan kebijakan didukung adanya kajian dan analisis yang kurang memadai	(5) rekomendasi kebijakan dan rencana aksi													

	b	Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung dengan bukti yang memadai	a	Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang sangat memadai	Background paper/ kajian kebijakan yang mendasari formulasi kebijakan	cakupan dari bukti meliputi data statistik dan administratif, bukti berbasis penelitian , bukti dari masyarakat dan pemangku kepentingan, serta bukti dari evaluasi.	A/B/C/D	A	100%	3,3	3,3				
			b	Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung bukti yang cukup memadai											
			c	Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan didukung sedikit bukti											
			d	Kajian dan analisis untuk perumusan kebijakan tanpa ada dukungan bukti sama sekali											
	c	penyusunan kebijakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan memadai untuk pembelajaran di masa mendatang?	a	semua terdokumentasi dengan baik	terdapat sistem/mekanisme yang mendukung dokumentasi kebijakan (meliputi dimensi perencanaan dan pelaksanaan kebijakan)	sistem/mekanisme dalam hal ini dapat meliputi sistem informasi, proses bisnis , atau tata laksana dalam pendokumentasian proses kebijakan.	A/B/C/D	A	100%	3,3	3,3				
			b	sebagian besar terdokumentasi dengan baik											
			c	sebagian kecil terdokumentasi dengan baik											
			d	tidak ada dokumentasi											
		Indeks Aspek 6										9,9			
	B.5	Inovatif								15		3,7125			
		Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikator	Ni*BI	1,2375	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence	
	a	kebijakan menawarkan/memberikan alternatif solusi baru terhadap permasalahan	a	>80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan	Dokumen analisis alternatif kebijakan, dokumentasi proses dialog/diskusi dengan ahli/stakeholder yang relevan	rancangan kebijakan memiliki kemungkinan untuk diterima apabila menawarkan pendekatan/solusi baru terhadap permasalahan publik Yang dihadapi. Dalam hal ini, perumus kebijakan dituntut untuk dapat sejauh mungkin melakukan elaborasi opsi-opsi baru yang diperoleh baik melalui kajian/analisis, atau mendapatkan informasi dari berbagai pihak Yang relevan	A/B/C/D	A	100%	1,2375	1,2375				
			b	>40%-80% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan											
			c	< 40% alternatif merupakan solusi baru terhadap permasalahan kebijakan											
			d	Tidak ada alternatif solusi baru terhadap permasalahan kebijakan											
	b	kebijakan memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder	a	>5 aspek Yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada	Dokumen analisis alternatif kebijakan, dokumentasi proses dialog/diskusi dengan ahli/stakeholder Yang relevan	aspek yang dimaksud dapat meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan. budaya, keamanan, politik, dsb.	A/B/C/D	A	100%	1,2375	1,2375				
			b	2-5 aspek Yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan Yang ada											

			c	hanya 1 aspek Yang memberikan nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan Yang ada													
			d	Tidak ada nilai tambah/manfaat baru bagi stakeholder dari kebijakan yang ada													
	c	kebijakan memberikan cara/metode baru untuk implementasinya	a	Cara/metode implementasi kebijakan berbeda sama sekali dengan yang lainnya	(1) Naskah Kebijakan (2) Background paper/ kajian kebijakan Yang mendasari formulasi kebijakan	Terdapat kebaruan / inovasi metode pelaksanaan kebijakan pada dokumen disain/rancangan implementasi kebijakan	A/B/C/D	A	100%	1,2375	1,2375						
			b	Terdapat cukup banyak unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi													
			c	Terdapat beberapa unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi													
			d	Tidak ada unsur kebaruan dalam cara/metode implementasi													
		Indeks Aspek 7										3,7125					
	Indeks Aspek 3 + 4 + 5 + 6 + 7								24,75								
	TOTAL																
	A.	AGENDA SETTING							20,25	45%							
	B.	FORMULASI KEBIJAKAN							24,75	55%							
	PERENCANAAN KEBIJAKAN								45	100%							

II	EVALUASI KEMANFAATAN KEBIJAKAN								55							
	C.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN								50			27,5			
		C.1	Pengorganisasian								30			8,25		
			Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikator	Ni*BI	2,0625	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence	
		a	Dilakukan uji coba/piloting terhadap kebijakan	a	Dilakukan uji coba/pilotine dengan lingkup relatif lebih luas dan waktu yang lama	1. turunan kebijakan yang ditetapkan, seperti SE, peraturan teknis (bupati/walikota), SK, dll 2.TOR/KAK/RAB, dsb	Uji coba/piloting kebijakan merupakan kegiatan pra implementasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas keberhasilan program/kebijakan.	A/B/C/D	A	100%	2,0625	2,0625				
		b		Dilakukan uji coba/piloting dengan lingkup dan waktu yang cukup												
		c		Dilakukan uji coba/piloting dengan lingkup dan waktu yang sempit/terbatas												
		d		Tidak dilakukan uji ccba/piloting												
		b	Kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan	a	terdapat kejelasan unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan	surat keputusan, peraturan, pedoman, atau bentuk dokumen resmi lainnya	Berisi deskripsi kelembagaan yang dibentuk dan lampiran dokumen legal terkait kelembagaan.	A/B/C/D	A	100%	2,0625	2,0625				
		b		terdapat unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan namun tidak sesuai dengan kebutuhan	Tahap ini merupakan upaya untuk melihat apakah implementasi kebijakan didukung oleh aspek kelembagaan yang baik											
		c		terdapat unit kerja/kelompok kerja/tim yang mengimplementasikan kebijakan namun tidak jelas kewenangan dan tanggungjawabnya												
		d		tidak terdapat unit kerja/kelompok kerja/tim yang berwenang den bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan												
		c	Terdapat kejelasan strategi implementasi kebijakan yang dilengkapi dengan ukuran/indikator keberhasilan tujuan kebijakan	a	Terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas dengan memuat indikator target keberhasilan implementasi	bentuk dokumen dapat berupa rencana kerja, pedoman/juknis dan atau timeline kegiatan (TOR, KAK, dsb)	Rencana kerja merupakan serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu tim dan/atau seseorang mencapai tujuan tersebut dan memuat rencana kerja, jadwal/road	A/B/C/D	A	100%	2,0625	2,0625				
		b		terdapat strategi implementasi kebijakan yang jelas, namun belum memuat indikator target keberhasilan												

			c	Terdapat strategi implementasi kebijakan namun tidak jelas dan belum memuat indikator target keberhasilan implementasi		map/rencana aksi dan rencana alokasi sumber daya.								
			d	Tidak terdapat strategi implementasi kebijakan										
	d	Terdapat alokasi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran sudah sesuai dengan kebutuhan	a	Rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang sangat sesuai dengan kebutuhan	lampiran notulen rapat dalam penentuan alokasi SDM atau telaahan staf , SK tim, peraturan, dokumen resmi RAB	Jumlah alokasi SDM dan anggaran harus sesuai dengan yang dibutuhkan agar efektif dan efisien.	A/B/C/D	A	100%	2,0625	2,0625			
		b	tersedia rencana alokasi SDM dan anggaran yang cukup sesuai dengan kebutuhan											
		c	tersedia rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran namun hanya beberapa yang sesuai dengan kebutuhan											
		d	tidak tersedia rencana alokasi sumber daya manusia dan anggaran											
		Indeks Aspek 8									8,25			
	C.2	Komunikasi Kebijakan								35		9,625		
		Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikator	Ni*BI	3,20833333	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence
	a	Terdapat strategi komunikasi kebijakan yang baik	a	Terdapat strategi komunikasi kebijakan dengan mempertimbangkan seluruh target audience/Pemangku kepentingan yang terkait	1. dokumen rencana komunikasi kebijakan (notulen, telaahan staf, dll) yang menyebutkan stakeholder yang akan terlibat dalam proses komunikasi kebijakan dan perannya 2. dokumentasi kegiatan, SS medsos, dsb	Ada rencana komunikasi yang memuat target komunikan dan metode komunikasi. Dalam penentuan target itu dipastikan memasukkan kelompok yang mungkin terdampak oleh kebijakan, terutama kelompok rentan. Harus dicantumkan stakeholder apa saja yang ada dalam proses komunikasi kebijakan,	A/B/C/D	A	100%	3,208333333	3,208333333			
		b	Terdapat strategi komunikasi kebijakan dengan mempertimbangkan beberapa target audience/Pemangku kepentingan yang terkait	a. Internal;										
		c	Terdapat strategi komunikasi kebijakan namun tidak mempertimbangkan target audience/Pemangku	b. Internal dan Eksternal (K/L/Pemda/SKPD lain terkait);										

		d	Tidak terdapat strategi komunikasi kebijakan		c. Internal dan Eksternal (K/L/Pemda/SKPD lain, dan masyarakat/stakeholder									
b	Frekuensi sosialisasi kepada target audience/pemangku kepentingan dalam 1 (satu) tahun pertama	a	> 9 kali	dokumentasi kegiatan, SS medsos, dsb	Melalui berbagai pertemuan, konsultasi, dan interaksi media sosial	A/B/C/D	A	100%	3,208333333	3,208333333				
		b	7-9 kali											
		c	4-6 Kali											
		d	1-3 Kali											
c	Variasi jenis media komunikasi kebijakan yang digunakan	a	Terdapat 6 atau lebih jenis media komunikasi	SS media, atau kliping media.	pilihan media komunikasi yang beragam diharapkan dapat memenuhi kebutuhan interaksi dengan para pemangku kepentingan	A/B/C/D	A	100%	3,208333333	3,208333333				
		b	Terdapat 4-5 jenis media komunikasi											
		c	Terdapat 2-3 jenis media komunikasi kebijakan											
		d	Terdapat 1 (satu) jenis media komunikasi kebijakan											
	Indeks Aspek 9									9,625				
C.3	Monitoring Kebijakan							35		9,625				
	Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikator	Ni*BI	3,20833333	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence	
a	Intensitas pelaksanaan kegiatan monitoring	a	Setiap bulan	laporan hasil pemantauan/monitoring kebijakan	Dilihat frekuensi pelaksanaan monitoring pada suatu kebijakan yang telah diimplementasikan	A/B/C/D	A	100%	3,208333333	3,208333333				
		b	Setiap triwulan											
		c	Setiap semester											
		d	Setiap tahun											
b	Ruang lingkup kegiatan monitoring	a	kegiatan monitoring mencakup seluruh ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun , termasuk alokasi SDM dan anggaran	laporan hasil pemantauan/monitoring kebijakan	melihat cakupan aspek dari monitoring yang dilaksanakan, yang terdiri dari anggaran, SDM, metode/cara, kelompok sasaran, dan sarana prasarana.	A/B/C/D	A	100%	3,208333333	3,208333333				
		b	kegiatan monitoring mencakup sebagian besar ruang lingkup dalam strategi implementasi yang disusun											
		c	Kegiatan monitoring mencakup sebagian kecil ruang lingkup strategi implementasi yang disusun											
		d	tidak dilakukan kegiatan monitoring implementasi kebijakan											

	c	Tindaklanjuti hasil monitoring implementasi kebijakan	a	>80% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti	penjelasan tentang tindak lanjut dari monitoring dan lampirkan surat/dokumen resmi yang lain sebagai tindak lanjut hasil monitoring	melihat apakah ada tindak lanjut dari kegiatan monitoring terhadap perbaikan implementasi kebijakan	A/B/C/D	A	100%	3,208333333	3,208333333			
			b	>40% - 80% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti										
			c	< 40% hasil monitoring implementasi kebijakan ditindaklanjuti										
			d	tidak ada tindak lanjut										
		Indeks Aspek 10									9,625			
	Indeks Aspek 8 + 9 + 10								27,5					
	D. EVALUASI KEBIJAKAN								50		27,5			
	D.1	Efektivitas							40		11			
		Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikator	Ni*BI	5,5	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence
	a	Dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan	a	Evaluasi terhadap pencapaian seluruh tujuan kebijakan secara terukur	Laporan evaluasi ketercapaian tujuan kebijakan beserta success and failure factors	Kebijakan yang dibuat dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dari dibuatnya kebijakan tersebut misalnya menyelesaikan	A/B/C/D	A	100%	5,5	5,5			
			b	Evaluasi terhadap pencapaian sebagian besar tujuan kebijakan secara terukur										
			c	Evaluasi terhadap pencapaian sebagian kecil tujuan kebijakan secara terukur										
			d	Belum dilakukan evaluasi terhadap pencapaian tujuan kebijakan										
	b	Dilakukan evaluasi atas metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan	a	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan	Laporan evaluasi kesesuaian metode implementasi dan tindak lanjutnya	Melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan telah tercapai.	A/B/C/D	A	100%	5,5	5,5			
			b	Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian besar metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan										
			c	Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian kecil metode/strategi implementasi kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan										

		d	Tidak dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian metode/strategi implementasi kebijakan dengan tujuan kebijakan											
	Indeks Aspek 11									11				
D.2	Efisiensi							15		4,125				
	Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai TK	Bobot Indikator	Ni*BI	2,0625	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence	
a	Dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan	a	Evaluasi atas efisiensi kebijakan terukur disertai dengan kejelasan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan	Laporan evaluasi penggunaan sumber daya kebijakan (yang telah diidentifikasi pada tahap implementasi) dalam pencapaian output.	Dibandingkan antara pembiayaan dan output dari kegiatan penyusunan kebijakan. Realisasi anggaran dan output (Anggaran >=80% - 100%).	A/B/C/D	A	100%	2,0625	2,0625				
		b	Evaluasi atas efisiensi kebijakan terukur namun tidak disertai kejelasan tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan											
		c	Evaluasi atas efisiensi kebijakan tidak terukur											
		d	Belum dilakukan evaluasi atas efisiensi kebijakan											
b	Dilakukan upaya-upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan	a	Dilakukan upaya efisiensi terhadap seluruh aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan	Laporan evaluasi penggunaan sumber daya kebijakan (yang telah diidentifikasi pada tahap implementasi) dalam pencapaian output.		A/B/C/D	A	100%	2,0625	2,0625				
		b	Dilakukan upaya efisiensi terhadap beberapa aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan											
		c	Dilakukan upaya efisiensi terhadap salah satu aspek sumber daya dalam pencapaian tujuan											
		d	Tidak dilakukan upaya efisiensi sumberdaya dalam pencapaian tujuan kebijakan											
	Indeks Aspek 12									4,125				
D.3	Dampak dan Kemanfaatan							45		12,375				
	Tahapan/Pernyataan Kunci		Jawaban	Bukti	Keterangan	Pilihan Jawaban	Jawaban Terpilih	Nilai TK	Bobot Indikator	Ni*BI	2,475	List bukti dukung Perangkat Daerah	Evidence	

		a	Kelompok sasaran menerima atas keberadaan kebijakan	a	Seluruh atau sebagian besar kelompok sasaran, termasuk kelompok rentan, memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan	Tindak lanjut atau hasil evaluasi penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran seperti yang telah diidentifikasi pada tahap agenda setting (perception)	Kebijakan yang dibuat diharapkan juga dapat diterima oleh kelompok sasaran.	A/B/C/D	A	100%	2,475	2,475			
				b	Sebagian besar kelompok sasaran memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan										
				c	Hanya sebagian kecil kelompok sasaran yang memiliki persepsi positif atas keberadaan kebijakan										
				d	Belum dilakukan evaluasi terhadap penerimaan kelompok sasaran atas keberadaan kebijakan										
		b	Responsivitas kebijakan selaras dengan kebutuhan kelompok sasaran	a	Sebagian besar anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan kebutuhan mereka dan telah mendorong lahirnya nilai-nilai positif baru	Hasil evaluasi terhadap responsivitas kelompok sasaran (misal dilakukan melalui survei)	Kebijakan yang dibuat diharapkan juga mengakomodir kebutuhan kelompok sasaran.	A/B/C/D	A	100%	2,475	2,475			
				b	Sebagian besar anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan kebutuhan mereka namun tidak mendorong lahirnya nilai-nilai positif baru										
				c	Sebagian kecil anggota kelompok sasaran menilai kebijakan telah selaras dengan kebutuhan mereka										
				d	Belum dilakukan evaluasi terhadap responsivitas kebijakan atas kebutuhan kelompok sasaran										
		c	Hasil kebijakan memenuhi preferensi kelompok sasaran	a	Hasil kebijakan telah memenuhi preferensi kelompok sasaran dimana seluruh kelompok sasaran mengalami peningkatan utilitas/welfare	Tindak lanjut atau hasil dari penjelasan dampak dan manfaat kebijakan yang telah dilakukan di tahapan implementasi	Kebijakan yang dibuat diharapkan juga dapat memenuhi preferensi kelompok sasaran.	A/B/C/D	A	100%	2,475	2,475			
				b	Hasil kebijakan telah memenuhi preferensi kelompok sasaran dimana sebagian besar kelompok sasaran mengalami peningkatan utilitas/welfare										
				c	hasil kebijakan telah memenuhi preferensi kelompok sasaran dimana sebagian kecil kelompok sasaran mengalami peningkatan utilitas/welfare kelompok										

	d		d	Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap peningkatan utilitas /welfare kelompok sasaran										
		Hasil kebijakan memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan	a	Hasil kebijakan telah memberikan dampak terhadap seluruh kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan	Tindak lanjut atau hasil dari penjelasan dampak dan manfaat kebijakan yang telah dilakukan di tahapan implementasi	Tujuan kebijakan yang dibuat diharapkan juga dapat memberikan dampak kepada kelompok rentan	A/B/C/D	A	100%	2,475	2,475			
			b	Hasil kebijakan mamberikan dampak terhadap sebagian kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan										
			c	Hasil kebijakan belum memberikan dampak terhadap kelompok rentan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan										
			d	Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh hasil kebijakan terhadap kelompok rentan										
	e	Kebijakan meningkatkan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan yang ada sebelumnya	a	Kebijakan telah meningkatkan seluruh kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien	Laporan evaluasi penggunaan sumber daya kebijakan dibandingkan dengan proses kerja penyelesaian masalah	Sumber daya merupakan bahan - bahan yang digunakan dalam membuat ataupun menjalankan kebijakan. Bahan bahan tersebut seperti: anggaran, SDM, peralatan penunjang kebijakan, waktu, dll.	A/B/C/D	A	100%	2,475	2,475			
			b	Kebijakan telah meningkatkan sebagian besar kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien										
			c	Kebijakan telah meningkatkan sebagian kecil kualitas penggunaan sumber daya dan proses kerja penyelesaian masalah menjadi lebih efisien										
			d	Belum dilakukan evaluasi atas pengaruh kebijakan terhadap peningkatan kualitas penggunaan sumberdaya dan proses kerja										
		Indeks Aspek 13									12,375			
	Indeks Aspek 11 + 12 + 13									27,5				
	Total													
	C.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN							27,5			50%		

	D.	EVALUASI KEBIJAKAN			27,5	50%		
	EVALUASI KEMANFAATAN KEBIJAKAN				55	100%		
	Indeks Kualitas Kebijakan				100			

Sumber: Olahan Penulis, 2022

Petunjuk Pengisian Lembar Kerja Evaluasi:

1.	Jawaban Pilihan:	Untuk pertanyaan yang sifatnya Perangkat Daerah Inisiator Kebijakan hanya dapat memilih 1 jawaban, maka pada kolom Jawaban, Perangkat Daerah harus memilih salah satu diantara A/B/C/D, karena masing-masing jawaban memiliki poin yang berbeda. A = 100% B = 70% C = 30% D = 10%
		Untuk pertanyaan yang Perangkat Daerah Inisiator Kebijakan bisa memilih lebih dari satu jawaban: lebih atau sama dengan A, B, C, D, maka dapat dipilih keempatnya, ketiganya, keduanya, satu saja atau tidak sama sekali sesuai dengan kondisi kebijakan. A = 25% B = 25% C = 25% D = 25% Sehingga total 100%
2.	List Bukti Dukung Perangkat Daerah	Diisikan List atau daftar bukti dukung sesuai dengan jawaban yang telah diisi pada LKE dan dimiliki oleh PD. Misalkan: - Naskah Kebijakan - Berita Acara - Surat Edaran hasil pelaksanaan FGD - Dll
3.	<i>Evidence</i>	Diisikan Link <i>Google Drive</i> yang dapat diakses dengan berisikan file/data/dokumen bukti dukung sesuai dengan list bukti dukung yang diberikan.

BAB III

PENUTUP

Indeks Kualitas Kebijakan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dimana salah satu indikator pencapaian Reformasi Birokrasi Nasional ialah melalui Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan. Permasalahan terkait dengan kebijakan pemerintah adalah kualitas kebijakan masih buruk, tumpang tindih, tidak berpihak pada publik, serta minim *evidence based* (belum di dahului oleh kajian, dan lain-lain). Sehingga diperlukannya perbaikan manajemen kebijakan terutama dalam proses perumusan kebijakan dari hulu hingga hilir. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan penilaian mandiri terhadap seluruh kebijakan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan di tingkat daerah. Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini akan menghasilkan profil kualitas kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya akan dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan strategi peningkatan kualitas kebijakan bagi pemerintah. Dengan demikian, melalui buku Pedoman Penilaian Indeks Kebijakan Kabupaten Sidoarjo ini dijadikan sebuah acuan bagi penilaian Indeks Kualitas Kebijakan yang didalamnya dikembangkan kriteria-kriteria kunci yang sekaligus menjadi tolak ukur dalam penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mewujudkan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan yang berkualitas, maka seluruh kriteria kunci dalam Indeks Kualitas Kebijakan tersebut sebaiknya terpenuhi beserta dengan bukti pendukungnya. Dalam menghitung Indeks Kualitas Kebijakan terdapat beberapa tahapan, dimana antara tahapan yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Aspek tersebut dimulai dari perencanaan kebijakan yang terdiri dari agenda setting dan formulasi kebijakan. Aspek yang kedua adalah evaluasi kemanfaatan kebijakan yang terdiri dari implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten

Sidoarjo dalam menilai kualitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilihat dari proses pembuatan kebijakan dan bagaimana melakukan agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, serta melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR